

BAB III

PRAKTIK POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

A. Pengertian Politik Identitas

Politik secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mulai dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatistis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk

menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.¹

Sedangkan Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Jika dicermati Politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. Menurut Agnes Heller politik identitas adalah gerakan politik yang focus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama.²

¹ Juhana Nasrudin, Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022) Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018: 34-47, P. 36-37.*

² Juhana Nasrudin, Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022) Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018: 34-47, P. 36-37.*

Namun, dalam perjalanan berikutnya, politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian itu, bukan berarti tidak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas. Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama.³ Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bias dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Jadi secara umum teori umum politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (*salient*) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. *Pertama*, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk

³ Abdillah S., Ubed. *Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Yayasan Indonesiatera. 2002. p.16.

mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. *Kedua*, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, termasuk pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertarungan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertarungan.⁴

B. Ciri-Ciri Politik Identitas

Politik identitas merupakan salah satu fenomena politik yang berkembang pesat dalam masyarakat kontemporer, terutama di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, agama, ras, dan budaya. Fenomena ini ditandai oleh upaya sekelompok individu atau komunitas untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka berdasarkan identitas kolektif tertentu. Identitas yang dimaksud bisa berbasis pada suku, agama, bahasa, jenis kelamin, orientasi seksual,

⁴ Juhana Nasrudin, POLITIK IDENTITAS DAN REPRESENTASI POLITIK (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022) Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama* ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018: 34-47, P. 36-37.

atau latar belakang budaya lainnya. Ciri paling mencolok dari politik identitas adalah munculnya narasi politik yang sangat berfokus pada identitas kelompok sebagai landasan perjuangan, bukan pada gagasan universal seperti keadilan sosial atau pemerataan ekonomi. Dalam konteks ini, identitas bukan hanya menjadi bagian dari jati diri sosial, tetapi juga dikonstruksikan sebagai alat mobilisasi politik yang efektif.

Salah satu ciri khas politik identitas adalah penekanan yang sangat kuat terhadap simbolisme identitas dalam ruang publik dan diskursus politik. Para aktor politik seringkali menggunakan simbol-simbol agama, pakaian adat, bahasa daerah, atau narasi sejarah kelompok untuk menegaskan eksistensi mereka dan membangun loyalitas dari kelompok yang merasa memiliki identitas yang sama. Di balik itu, terdapat asumsi bahwa kelompok tertentu memiliki sejarah penindasan, marginalisasi, atau pengabaian, sehingga politik identitas dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan historis tersebut.

Kemunculan politik identitas diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti:

Pertama, munculnya konflik antar agama terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Poso dan Ambon), sementara konflik bernuansa etnis juga terjadi di Kalimantan. Kekerasan kolektif di Indonesia meningkat terutama antara tahun 1997 dan 2001, dimana sekitar 10.247 orang tewas dalam lebih dari 2.444 insiden. Kematian ini terutama terjadi karena pertikaian agama dan etnis. Dari total kematian tersebut, hampir 9.612 orang Indonesia tewas akibat perkelahian antar etnis dalam 599 insiden. Setengah dari korban (5.452 orang dalam 433 insiden) terbunuh dalam perkelahian agama antara Muslim dan Kristen. Selanjutnya, 4.122 orang tewas karena sentimen dan kebencian etnis, dengan sebagian besar korban (1.259 orang dalam 32 insiden) terbunuh karena kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Perkelahian antara orang Madura dan Dayak/Melayu di Sambas dan Sampit menyebabkan 2.764 orang tewas dalam 70 insiden.⁵

Kedua, menurut Mulia dalam Maarif, arus politik identitas Islam, terutama yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis Islam, telah menghasilkan kekerasan fisik dan simbolik: (1) kekerasan fisik: penutupan gereja dan masjid. Kekerasan fisik lainnya menyebabkan objek kekerasan mengalami trauma, luka-luka, dan

⁵ Moh Dahlan, "Hubungan Agama Dan Negara," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 19.

meninggal dunia; (2) kekerasan simbolik berupa tulisan-tulisan atau ceramah, ceramah yang menghina agama lain. Meningkatnya perjuangan kelompok fundamentalis Islam untuk menegakkan syariah Islam baik secara revolusioner maupun konstitusional. Menurut Maarif, gerakan-gerakan ini termasuk MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Partai Keadilan Sejahtera), sebuah partai Islam yang dipengaruhi oleh cita-cita Islam. Cita-cita al-Ikhwan al-Muslimun (Ikhwanul Muslimin), yang didirikan oleh Hasan Al-Bana di Mesir, mengikuti jalur demokrasi untuk mencapai tujuannya. Meskipun model penyampaian aspirasinya berbeda, faksi-faksi ini memiliki perjuangan yang sama dalam hal tuntutan, yaitu penerapan syariat Islam di Indonesia. Mereka tidak mengakui eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang sah dan final serta berjuang untuk mengganti ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Ketiga, digunakannya isu etnis dan agama dalam kontestasi pada pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017. Menurut Nasrudin,²⁴ politik identitas dan orientasi representasi politik mempengaruhi

⁶ Juhanah Nasrudin, "Politik Identitas Dan Representasi Politik," *Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2018): p.1.

proses demokrasi pada Pilkada DKI 2017. Penggunaan politik identitas berbasis etnis dan agama dalam pemilihan gubernur Jakarta telah membelah masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok agama. Menurut Arjon,²⁵ sejak kejatuhan Presiden Soeharto dan era Orde Baru (ORBA), sentimen agama belum pernah digunakan untuk menyerang agama lain hingga pemilihan gubernur Jakarta 2017. Pemisahan dua ideologi ini cepat atau lambat akan dapat menciptakan dua praktik berbahaya yang tumbuh di masyarakat, yaitu eksklusivisme Islam dan pemerintahan yang berjalan dengan tangan besi. Indonesia telah berulang kali mengalami pemisahan antara Islam sebagai ideologi agama dan ideologi nasionalis, dan akibatnya fatal, seperti pembantaian 1965 dan kerusuhan 1998. Dalam kerangka ini, identitas menjadi basis klaim politik yang dianggap sah karena berasal dari pengalaman kolektif yang dirasakan bersama. Konsekuensinya, proses politik tidak lagi bersifat rasional dan inklusif, melainkan cenderung emosional dan eksklusif, karena lebih mengutamakan kesamaan identitas daripada kesamaan visi atau program.⁷

⁷ Agus Supratikno, Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia AMI: *Jurnal Sosial-Keagamaan dan Teologi di Indonesia* p-ISSN: Volume I, No. 1, Juni 2023, p.11.

Ciri lainnya adalah munculnya polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat. Politik identitas mendorong terbentuknya pemisahan antara “kami” dan “mereka” yang dapat memperuncing ketegangan horizontal, terutama ketika identitas dijadikan alat pembeda yang mutlak. Polarisasi ini tidak hanya terjadi dalam ranah politik, tetapi juga merembet ke dalam kehidupan sosial sehari-hari, di mana interaksi antarkelompok menjadi semakin terbatas, curiga, bahkan bermusuhan. Ketika sebuah kelompok merasa identitasnya terancam oleh dominasi kelompok lain, maka akan muncul sentimen defensif yang menyulut konflik terbuka atau laten. Dalam situasi ini, proses demokrasi bisa mengalami kemunduran karena ruang deliberasi yang seharusnya terbuka dan rasional justru tertutup oleh fanatisme kelompok.

Politik identitas juga ditandai oleh kemunculan elite atau tokoh yang mengklaim sebagai representasi sah dari kelompok identitas tertentu. Para elite ini biasanya membangun legitimasi dengan mengangkat narasi penderitaan, ketidakadilan, atau keterpinggiran yang dialami kelompoknya, lalu menjanjikan perbaikan melalui penguasaan politik. Dalam praktiknya, mereka memanfaatkan identitas kelompok untuk meraih dukungan politik, sering kali tanpa

membawa program yang substantif. Hal ini dapat mengarah pada politisasi identitas secara berlebihan yang tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan kelompok yang diwakili, karena perjuangan yang dijalankan lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pada transformasi struktural.⁸

Ciri lainnya yang cukup kentara adalah adanya eksklusivitas dalam perumusan kebijakan dan partisipasi politik. Politik identitas cenderung membatasi akses politik hanya bagi kelompok yang memiliki identitas serupa, sementara kelompok lain dikesampingkan atau tidak diberi ruang yang setara. Hal ini berbahaya karena berpotensi menciptakan diskriminasi struktural dan mengabaikan prinsip-prinsip pluralisme dalam demokrasi. Di banyak kasus, politik identitas bahkan bisa menjustifikasi tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama pembelaan terhadap kelompok sendiri. Ketika identitas dijadikan alat politik, maka kebijakan yang lahir pun berpotensi bias dan tidak mewakili seluruh kepentingan masyarakat.

Politik identitas memiliki beberapa ciri yang saling berkaitan, yaitu penekanan berlebih pada simbolisme identitas, polarisasi sosial

⁸ Supratikno, *Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis...*, p. 12.

yang tajam, munculnya elite representatif yang mempolitisasi penderitaan kelompok, serta kecenderungan untuk menciptakan eksklusivitas dalam ruang politik. Meskipun politik identitas bisa menjadi sarana artikulasi bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan, namun jika tidak diimbangi dengan komitmen terhadap nilai-nilai inklusif dan demokratis, politik identitas justru dapat menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial dan stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan untuk mengelola keberagaman dengan pendekatan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

C. Praktik Politik Identitas Di Era Reformasi

Sejak Reformasi 1998, Indonesia mengalami transisi politik yang sangat signifikan dari sistem otoriter menuju demokrasi yang lebih terbuka. Pada awalnya, era Reformasi membawa harapan besar akan terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis. Namun, salah satu fenomena yang semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir adalah politik identitas, yang memanfaatkan aspek-aspek identitas sosial seperti agama, etnisitas, dan suku untuk memperoleh dukungan politik. Politik identitas ini

berkembang pesat di Indonesia, seiring dengan semakin meningkatnya kebebasan berpendapat dan dinamika politik yang lebih terbuka setelah rezim Orde Baru tumbang. Pada periode pasca-Reformasi, politik identitas menjadi alat yang efektif bagi banyak aktor politik untuk meraih suara dan mendapatkan dukungan massa, terutama menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemanfaatan politik identitas ini terlihat jelas dalam berbagai kampanye politik yang mengedepankan isu agama, suku, dan etnis sebagai strategi mobilisasi massa.⁹

Fenomena ini tidak hanya terbatas pada partai politik besar, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok politik baru yang muncul pasca-Reformasi. Salah satu contoh yang mencolok adalah Pilkada Jakarta 2017, di mana isu identitas agama menjadi sangat dominan. Kampanye yang berfokus pada perbedaan agama antara calon gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang beragama Kristen dan muslim, Anies Baswedan, menunjukkan bagaimana politik identitas bisa memecah belah masyarakat dan menciptakan polarisasi sosial. Ahok yang berasal dari keturunan Tionghoa dan

⁹ Annisa Meilani Zakiah dkk, Pengaruh Politik Identitas dalam Kestabilan Ketatanegaraan di Indonesia Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 04, No. 2, Agustus-Desember 2024. E-ISSN: 2988-5299.p.183

beragama Kristen, menghadapi serangan politik yang memanfaatkan sentimen agama, yang pada akhirnya berkontribusi pada kekalahan politiknya (Romli & Nurlia, 2023). Kampanye negatif ini berbasis pada citra Ahok sebagai "musuh" umat Islam, meskipun secara keseluruhan kebijakan yang dijalankannya selama menjabat tidak berkaitan langsung dengan isu agama. Namun, faktor identitas agama dimainkan untuk meraih suara kelompok tertentu, yang memperburuk polarisasi masyarakat Jakarta, bahkan Indonesia secara keseluruhan.

Fenomena serupa terjadi di beberapa daerah lain, di mana politik identitas berbasis etnisitas dan agama juga digunakan sebagai alat untuk meraih suara. Misalnya di beberapa Pilkada daerah, aktor politik mengedepankan agenda agama dan identitas suku untuk menarik perhatian pemilih. Praktik politik identitas semacam ini sering kali memanfaatkan ketegangan sosial yang ada dalam masyarakat, seperti perbedaan agama, untuk menciptakan oposisi yang lebih tajam dan memobilisasi pemilih berdasarkan afiliasi agama atau etnis mereka.¹⁰

¹⁰ Zakiah dkk., *Pengaruh Politik Identitas dalam Kestabilan Kestatanegaraan di Indonesia...*, p. 185.

Dengan demikian dari uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perhelatan politik pada Pilkada DKI putaran kedua tidak luput dari orientasi politik identitas dan representasi. Adapun bentuk orientasinya mengarah kepada orientasi ekonomi, agama dan ras. Ada beberapa alasan hal yang mendorong demikian, faktor pertama, : elektabilitas pasangan calon pada Pilkada DKI putaran kedua melalui data-data yang disampaikan oleh beberapa lembaga survey yang menghasilkan bahwa elektabilitas dari, faktor kedua, : kandidat mengalami fluktuasi hal ini dipengaruhi oleh beberapa kasus yang ikut mewarnai perhelatan politik di DKI tersebut. Seperti halnya kasus yang terkait etnis dan Agama sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas. Selain itu lebih jelas lagi terlihat pada kemenangan pasangan calon Anis-Sandi yang memenangkan pemilihan putaran kedua. Hal itu pun tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatar belakangnya, seperti adanya aksi damai 212 terkait kasus hukum yang menjerat Ahok.¹¹

Selain Jakarta, praktik serupa juga terjadi di berbagai daerah lainnya. Di beberapa wilayah yang homogen secara kultural dan

¹¹ Juhana Nasrudin, POLITIK IDENTITAS DAN REPRESENTASI POLITIK (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022) Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama* ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018: 34-47, p. 45.

keagamaan, calon dari luar daerah atau yang dianggap berbeda sering kali dihadapkan pada tantangan serius. Mereka tidak hanya bersaing secara programatik, tetapi juga harus menghadapi diskriminasi politik yang terselubung. Dalam beberapa kasus, baliho calon sengaja dirusak, kampanye mereka diboikot, atau bahkan diserang secara fisik oleh kelompok intoleran. Politik identitas di sini berubah menjadi alat eksklusif yang menyingkirkan mereka yang berbeda. Keadaan semacam ini merusak prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin persamaan hak bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, terlepas dari latar belakang identitasnya.

Di sisi lain, media sosial memperkuat penyebaran politik identitas. Narasi-narasi yang menyentuh sentimen keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan lebih mudah viral di internet dibandingkan dengan narasi berbasis program atau visi kebangsaan. Akibatnya, masyarakat yang terpapar informasi sepihak atau hoaks menjadi lebih mudah termobilisasi secara emosional. Konten-konten di media sosial tidak hanya memperkuat polarisasi, tetapi juga mempersempit ruang dialog yang sehat dan rasional. Dalam situasi seperti ini, publik cenderung mengonsumsi informasi yang

memperkuat keyakinan mereka sendiri, dan menolak informasi yang datang dari kelompok yang dianggap “berbeda”.

Meski demikian, politik identitas tidak selalu bersifat negatif. Dalam beberapa kasus, ia dapat menjadi sarana penting bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk memperjuangkan hak dan representasi politik mereka. Misalnya, peningkatan representasi perempuan dalam parlemen, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas adalah bagian dari politik identitas yang bersifat progresif. Dalam hal ini, identitas digunakan bukan untuk memecah belah, melainkan untuk memperkuat inklusivitas dalam sistem demokrasi. Politik identitas semacam ini perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang berbasis pada keadilan sosial dan prinsip kesetaraan hak.

Namun, persoalan utama muncul ketika identitas digunakan secara eksklusif, tanpa membuka ruang dialog atau kolaborasi lintas identitas. Ketika politik hanya dibangun di atas fondasi “kami” versus “mereka”, maka yang terjadi adalah fragmentasi masyarakat. Demokrasi kehilangan maknanya ketika perbedaan identitas dipolitisasi secara ekstrem dan dijadikan alasan untuk menyingkirkan yang lain. Inilah tantangan terbesar dari praktik

politik identitas di era Reformasi: bagaimana menjaga agar semangat pengakuan dan representasi tidak berubah menjadi alat polarisasi dan konflik.

Untuk itu, negara memiliki peran penting dalam mengelola praktik politik identitas agar tidak menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Regulasi yang melarang kampanye berbasis SARA, edukasi politik bagi masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan harus terus diperkuat. Di sisi lain, peran tokoh masyarakat, pemuka agama, dan media juga sangat menentukan dalam membentuk opini publik yang lebih inklusif. Jika semua elemen masyarakat dapat bekerja sama dalam membangun demokrasi yang sehat, maka politik identitas tidak lagi menjadi alat perpecahan, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dan persatuan dalam keberagaman.

Praktik politik identitas di era Reformasi merupakan fenomena yang kompleks. Ia lahir dari ruang kebebasan yang lebih terbuka, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi Indonesia. Di satu sisi, politik identitas bisa menjadi alat perjuangan bagi kelompok yang terpinggirkan. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, ia bisa memperbesar polarisasi sosial, merusak tatanan

demokrasi, dan melemahkan integrasi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijak dan proporsional sangat dibutuhkan agar praktik politik identitas tidak keluar dari rel demokrasi yang sehat.